



RENCANA STRATEGIS

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2017-2022**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**

Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka, Kel. Air Itam, Pangkalpinang, 33148, Telp. (0717) 439302

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun **"RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017-2022"** sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah pemerintahan diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk membangun Prestasi Aksi dan Prestasi Hasil yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis yang terfokus pada peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan lokus pada pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengelolaan dan pemberdayaan potensi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Rencana Strategis ini merujuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan RTRW (Rencana

Tata Ruang Wilayah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan didalam renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan indikator yang digunakan sebagai alat ukur juga dapat saling melengkapi antara kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Begitu pula halnya dari sisi pendanaan, jika sudah harmoni antara perencanaan pusat dan daerah maka, dana bantuan untuk menyelesaikan isu strategis di tingkat pemerintah daerah juga akan dengan lebih mudah dikucurkan oleh pemerintah pusat.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik melalui usaha pemikiran dan masukan sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 ini dapat tersusun dengan baik, Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan terimakasih dan penghargaan. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Desember 2017
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



H. HARDI, S.H., M.H
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611013 198101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN...	 6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6
2.2 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan PD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kep. Babel	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas	46
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	 48
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	48
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	50
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota	53
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	54
3.5 Penentuan Isu Isu Strategis	55
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	 58
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas	58

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	60
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	62
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas.....	62
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	63
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	63
BAB VII INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJDM	75
7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	75
BAB VIII PENUTUP	82
LAMPIRAN	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra perangkat daerah merupakan rencana strategis yang disusun dalam kurun waktu 5 tahunan oleh perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang ada untuk menyelesaikan permasalahan/isu pada bidang urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan aturan perundangan yang berlaku. Renstra perangkat daerah disusun dengan mengangkat isu strategis bidang urusan yang akan diselesaikan berdasarkan analisa faktor kekuatan/strength (S), kelemahan/weakness (W), peluang/opportunity (O) dan tantangan/threat (T), atau yang lebih akrab dikenal dengan analisa SWOT. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan, maka renstra yang akan disusun adalah rencana strategis bidang kelautan dan perikanan dengan jangka waktu 5 tahunan untuk menjawab permasalahan/isu strategis yang dihadapi yang merupakan hasil analisa SWOT terhadap faktor internal dan eksternal bidang kelautan dan perikanan.

Renstra berfungsi sebagai buku panduan dalam melaksanakan proses pembangunan daerah 5 tahunan untuk menjawab isu strategis bidang kelautan dan perikanan yang telah dirumuskan di dalamnya. Renstra dapat juga diartikan sebagai *roadmap* atas semua usulan kegiatan yang dimunculkan tiap tahunnya oleh bidang yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. *Roadmap* berfungsi sebagai justifikasi apakah usulan kegiatan yang diusulkan tiap tahunnya masih sesuai atau sudah melenceng jauh dari upaya untuk menjawab isu strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya di dalam dokumen renstra perangkat daerah.

Renstra disusun dengan mempertimbangkan ide dan masukan yang dirumuskan dalam berbagai pertemuan baik yang bersifat internal perangkat daerah atau dengan

mengikutsertakan instansi lainnya maupun dengan mendengarkan langsung permasalahan yang ada dari hasil kunjungan lapangan ke masyarakat. Seluruh permasalahan/isu yang ada mulai diekstraksi dan diklasifikasi berdasarkan tingkat *urgensynya* (U), *seriousnessnya* (S) dan *growthnya* (G) atau lebih dikenal dengan istilah metode USG. Berbagai permasalahan/isu tadi ditakar dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, disamping itu juga harus dilihat seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani atau ditunda dan yang terakhir seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar lagi jika tidak segera ditangani.

Dalam hal ini, renstra pada Dinas Kelautan dan Perikanan ini juga harus disusun dengan merujuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan didalam renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan indikator yang digunakan sebagai alat ukur juga dapat saling melengkapi antara kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Begitu pula halnya dari sisi pendanaan, jika sudah harmoni antara perencanaan pusat dan daerah maka, dana bantuan untuk menyelesaikan isu strategis di tingkat pemerintah daerah juga akan dengan lebih mudah dikucurkan oleh pemerintah pusat.

Tiap alternatif strategi tadi disusun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta indikatornya untuk dapat dinilai tingkat pencapaian dari masing-masing sasaran, progam dan kegiatan yang diusulkan. Selain pendekatan secara perencanaan aksi, di dalam dokumen renstra perangkat daerah juga harus

disusun rencana kebutuhan pembiayaannya sebagai ukuran awal dalam penentuan pagu indikatif perangkat daerah pada masing-masing tahun anggaran pelaksanaan pembangunan. Secara berkelanjutan, seluruh program dan kegiatan yang sudah disusun di dalam dokumen renstra ini akan dieksekusi melalui Renja Perangkat Daerah tiap tahunnya. Renja Perangkat daerah diharapkan tidak akan jauh melenceng dari arahan dan garis haluan yang sudah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun.

1.2 Landasan Hukum

Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).

Renstra Dinas kelautan dan Perikanan ini disusun berdasarkan Lampiran Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menjawab tantangan berdasarkan isu strategis yang telah dipetakan sebelumnya. Adapun tujuan yang ingin diraih adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini untuk periode 5 tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra ini dibagi menjadi 8 Bab, dimana tiap bab memiliki karakteristik tersendiri. **Bab I** merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang diperlukannya renstra ini, landasan hukum yang mendasarinya serta maksud dan tujuan disusunnya dokumen renstra ini. Pada **Bab II** digambarkan pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dijelaskan pada Bab I, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada periode pelaksanaan renstra sebelumnya.

Bab III berisi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Bab ini mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, menelaah Renstra K/L, menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis. **Bab IV** memuat tujuan dan sasaran jangka menengah dari perangkat daerah. Tujuan dan sasaran yang dimaksud disini adalah pada level dampak dari diberlakukannya Renstra ini kedepan nantinya. Berisi

tujuan, sasaran serta indikatornya sebagai alat ukur keberhasilan.

Bab V berisi Strategi dan arah kebijakan. Masing-masing tujuan dan sasaran yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya akan dirinci lebih detil bagaimana cara mencapainya melalui strategi dan arah kebijakan yang akan dirumuskan. **Bab VI** berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII berisi kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dan terakhir adalah **Bab VIII**, ataupun penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan diperjelas oleh Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Provinsi Kepulauan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan tugas-tugas khusus yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat dibidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

1. Menyusun kebijakan dibidang Kelautan dan Perikanan;
2. Melaksanakan pengaturan administrasi dan teknis bidang Kelautan dan Perikanan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
4. Melaksanakan pembinaan umum dibidang Kelautan dan Perikanan;
5. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
6. Melaksanakan pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten dan Kota di bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;

8. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha Kelautan dan Perikanan;
9. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;
10. Melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas;
11. Melaksanakan peningkatan sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat serta melaksanakan pengaturan dibidang Kelautan dan Perikanan;

Urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Institusi ini dijalankan oleh 120 orang Aparat Sipil Negara (ASN) dan 55 orang Tenaga Kontrak (Laporan Tahunan Dinas, 2016). Sebagai instansi yang mengurus sektor kelautan dan perikanan di tingkat provinsi, DKP Provinsi dibantu oleh Kelembagaan yang sama di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu DKP Kabupaten/Kota. Dan untuk kewenangan yang berada di tingkat pusat, DKP Provinsi dibantu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

2.1.1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Tugas : memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- g. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan

Tugas : mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mengoordinasikan bidang-bidang.

Uraian tugas Sekretariat meliputi:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Kelautan dan Perikanan serta UPTD; mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA,

DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;

- i. mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kelautan dan perikanan;
- k. mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- l. memverifikasi kajian dan pertimbangan;
- m. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- n. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- o. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kesekretariatan dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibawahnya terdapat 3 Subbag yaitu :

1. Subbag Perencanaan
2. Subbag Umum
3. Subbag Keuangan

2.1.3. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut

Bidang Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pengelolaan Ruang Laut.

Uraian tugas Bidang Pengelolaan Ruang Laut meliputi:

- a. memverifikasi rumusan kebijakan bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan dan pemanfaatan ruang laut, pengelolaan konservasi laut daerah serta rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
- b. mengoordinir perencanaan program kerja bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan

- dan pemanfaatan ruang laut, pengelolaan konservasi laut daerah serta rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
- c. mengoordinasikan integrasi dan sinkronisasi dengan instansi lain yang terkait dalam pengembangan dan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil;
 - d. mengawas dan memverifikasi konsep rekomendasi perizinan lingkup bidang pengelolaan ruang laut;
 - e. mengoordinir pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. mengevaluasi dan memonitoring pengelolaan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil;
 - g. mengawasi mengendalikan pelaksanaan pengelolaan ruang laut berdasarkan rencana operasional dinas kelautan dan perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - h. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - i. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Ruang Laut dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibawahnya terdapat 3 Seksi yaitu :

- 1. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut
- 3. Seksi Konservasi dan rehabilitasi Ekosistem pesisir.

2.1.4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perikanan tangkap.

Uraian tugas Bidang Perikanan Tangkap meliputi:

- a. memverifikasi rumusan kebijakan perikanan tangkap;

- b. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi;
- c. mengkoordinir serta mengawasi rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin
- d. pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- e. mengawas dan membina fasilitasi pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi, penyiapan rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, penyiapan rekomendasi penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- g. mengendalikan pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi, penyiapan rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, penyiapan rekomendasi penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- h. mengevaluasi program kebijakan teknis perikanan tangkap;
- i. mengevaluasi bahan fasilitasi sarana penangkapan ikan dan prasarana perikanan;

- j. mengevaluasi bahan fasilitasi pengelolaan sumber daya perikanan;
- k. mengevaluasi bahan fasilitasi pengembangan usaha perikanan tangkap;
- l. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perikanan tangkap;
- m. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibawahnya terdapat 3 Seksi yaitu :

- 1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan
- 2. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
- 3. Seksi Sarana & Prasarana Perikanan

2.1.5. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan.

Uraian tugas Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan meliputi:

- a. memverifikasi rumusan kebijakan teknis Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
- b. mengoordinasikan perencanaan program kerja bidang Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
- c. mengoordinasikan integrasi dan sinkronisasi dengan instansi lain yang terkait Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;

- d. mempromosikan kebijakan dan pelaksanaan bina usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
- e. memverifikasi rekomendasi perizinan lingkup bidang pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
- f. mengkoordinir fasilitasi bantuan permodalan dan pemasaran usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
- g. membina usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
- h. mengawas bahan rekomendasi penerbitan izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- i. mengevaluasi data dan informasi terkait pengembangan usaha, permodalan dan pemasaran serta investasi usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
- j. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- k. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perikanan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibawahnya terdapat 3 Seksi yaitu :

1. Seksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
2. Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi Usaha Perikanan
3. Seksi Usaha Perikanan Budidaya

2.1.6. Kepala Bidang Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan,

perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

Uraian tugas Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan meliputi:

- a. memverifikasi rumusan program dan kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
- b. mengoordinir perencanaan program kerja bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
- c. merancang dan mempromosikan program dan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
- d. mengoordinasikan integrasi dan sinkronisasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, tindak pidana perikanan dan illegal fishing dengan instansi terkait
- e. mengoordinir penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan pengawasan penangkapan ikan;
- f. mengoordinir penyiapan dan evaluasi bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan pembudidaya ikan;
- g. mengoordinir penyiapan dan evaluasi bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. mengoordinir penyiapan dan evaluasi bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut Provinsi;
- i. mengoordinir penyiapan dan evaluasi bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan usaha perikanan;
- j. mengoordinir penyiapan dan evaluasi bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan kegiatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- k. mengoordinir penyiapan dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan perencanaan dan

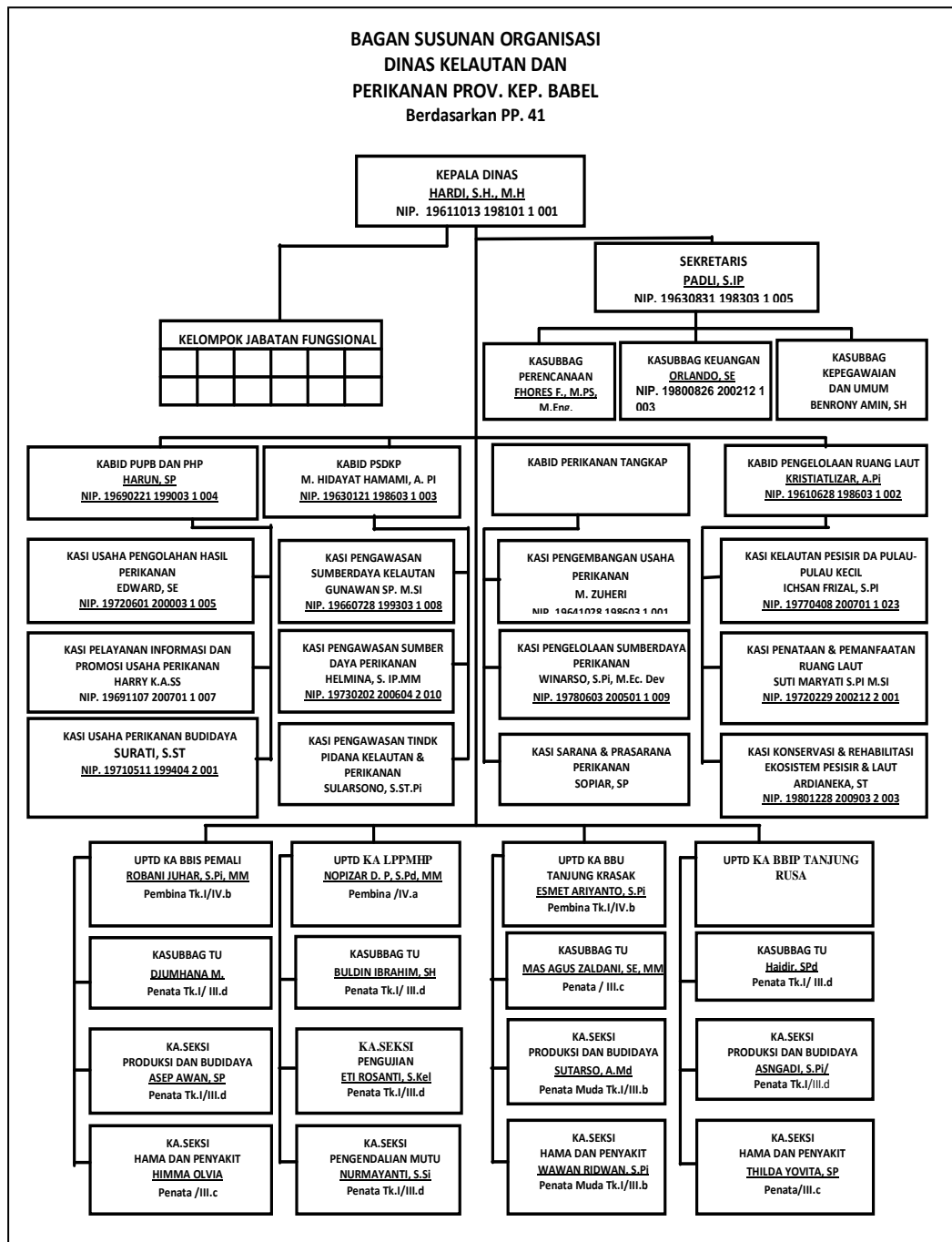
pemanfaatan wp3k, penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan/*illegal fishing*;

1. membina dan memimpin sosialisasi terkait penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
- m. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- n. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perikanan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibawahnya terdapat 3 Seksi yaitu :

1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan
2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan
3. Seksi Pengawasan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.

Di bawah ini disajikan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per tanggal 30 Desember 2016.



Gambar 2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan

Komposisi jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Komposisi Jumlah Pegawai

No	Status Pegawai	Golongan													Jlh
		Ic	Id	IIa	IIb	IIc	IIId	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	Iva	IVb	IVd	
1	PNS	1		4	7	3	12	9	38	11	24	4	6	1	120
2	Honorar														55
JUMLAH		1		4	7	3	12	9	38	11	24	4	6	1	175

Komposisi Klasifikasi PNS dan CPNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017.

Tabel 2.2 Komposisi Klasifikasi PNS dan CPNS

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3			
2	Pasca Sarjana/ S2	13	3	16
3	Sarjana / S1	40	19	59
4	Diploma-IV	4	1	5
5	Diploma-III	11	6	17
6	Diploma-I/ II	1	-	1
7	SLTA	17	4	21
8	SD	1	-	1
	JUMLAH	87	33	120

2.2.1 Sumber Daya Perikanan Tangkap

Terdapat 2 (dua) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), yaitu PPN Sungailiat di Pulau Bangka dan PPN Tanjungpandan di Pulau Belitung yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat. Disamping itu juga terdapat 8 (delapan) buah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di tiap kabupaten/kota, yaitu PPI Sungai Baturusa, PPI Kurau, PPI Sungaiselan, PPI Sadai, PPI Muntok, PPI Selat Nasik, PPI Manggar dan PPI Gantong. Selain itu juga terdapat Tempat

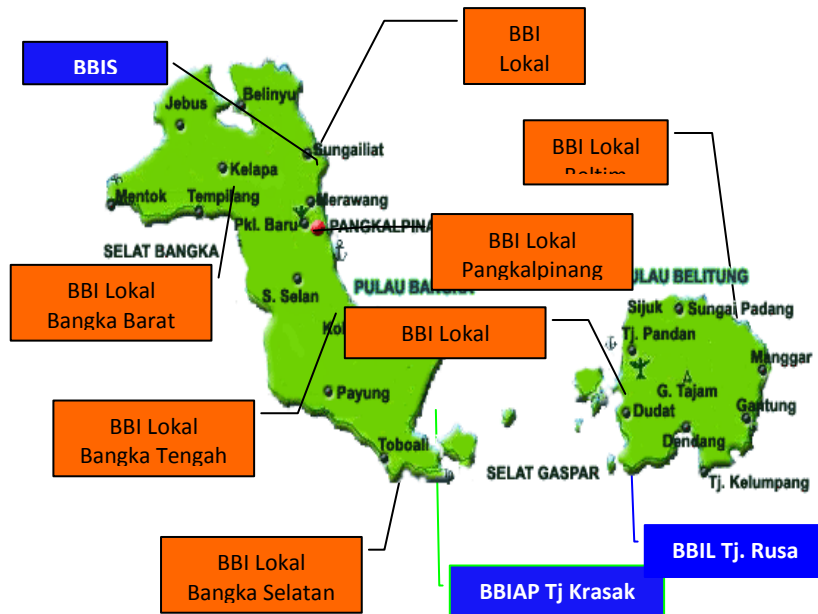
Pelelangan Ikan (TPI) yang cukup banyak tersebar di Kabupaten/Kota.



Gambar 2.2.1. Peta Sebaran Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.2.2 Sumber Daya Perikanan Budidaya

Untuk memperkuat fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengemban tugas memajukan sektor kelautan dan perikanan, Di bidang Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan dibantu oleh 3 UPTD Teknis perbenihan yaitu Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) di Sungailiat, Kabupaten Bangka, Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) di Tanjung Krasak, Kabupaten Bangka Selatan dan Balai Benih Ikan Laut (BBIL) di Kabupaten Belitung Membalong. Selain ke-3 balai benih budidaya yang menjadi UPT DKP Provinsi, juga terdapat balai benih ikan di 7 (tujuh) DKP Kabupaten/Kota. Selain balai benih yang dimiliki pemerintah, kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) juga mengembangkan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) sebagai usaha untuk membenihkan ikan secara mandiri. Berikut ini peta sebaran Sarana & Prasarana Perikanan Budidaya:



Gambar 2.2.2. Peta Sebaran Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.2.3 Sumber Daya Pengolahan, Pemasaran dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota baik yang berupa Unit Pengolah Ikan (UPI), Cold Storage, Pabrik es dan rumah kemasan yang secara umum dikelola langsung oleh masyarakat ataupun koperasi. Selain itu, sebagai institusi yang menjamin kelayakan mutu hasil perikanan terdapat Laboratorium Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) di Kota Pangkalpinang yang merupakan UPT DKP Provinsi.



Gambar 2.2.3. Peta Sebaran Sarana dan Prasarana
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

2.3. Kinerja Pelayanan PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Untuk menentukan tingkat keberhasilan kinerja pelaksanaan tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan, maka alat ukur yang digunakan adalah rata-rata persentase hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama 5 (lima) tahun anggaran, dari tahun 2012-2016 yang tertuang di dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dan Review Renstranya. Berdasarkan rata-rata persentase capaian dari 8 (delapan) indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan diperoleh rata-rata hasil capaian kinerja IKU sebesar 100,59 pada tahun 2012, mencapai 94,10 pada tahun 2013, mencapai 94,10 juga pada tahun 2014, mencapai 101,94 pada tahun 2015 dan mencapai 106,88 pada tahun 2016. Merujuk data tersebut, maka kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dapat melebihi persentase hasil

capaian kinerja 100 selama tiga tahun anggaran dari total pelaksanaan Renstra lima tahunan 2012-2016. Walaupun pada tahun 2013 dan 2014 tidak mencapai rata-rata 100 namun tetap menunjukkan angka capaian yang cukup optimal, yaitu sebesar 94,10. Hal ini menandakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan sudah cukup optimal melaksanakan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil capaian yang baik.

Berdasarkan rekapitulasi LKPJ 2012-2016, maka besaran persentase capaian IKU tersebut di atas secara detil dapat dilaporkan sesuai dengan tabel target IKU, tabel realisasi IKU dan tabel persentase capaian IKU yang telah mengalami revisi pada tahun 2015. Berikut tersaji *Review* Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bahan untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja PD, dimana dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dinas dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut analisis pengelolaan pendanaan pelayanan PD melalui pelaksanaan Renstra PD periode perencanaan sebelumnya tersaji pada tabel di bawah ini untuk dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaannya.

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	Fungsi Ekonomi																		
1	Peningkatan produksi Perikanan Tangkap (ton)				159.000	161.000	163.000	169.000	175.000	202.565	204.385	212.470	139.542	188.672	127,4	126,95	130,35	82,57	107,81
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)				118	119	120	107	109	89,73	90,54	102,98	101,44	107,75	76,04	76,08	85,52	94,8	98,85
3	Peningkatan produksi Perikanan Budidaya (Ton)				35.000	42.000	49.000	11.175	13.765	8.107,00	3.820,00	4.198,61	4.308,29	4.572,82	23,16	9,1	8,57	38,55	33,2
4	Jumlah Produksi Benih (Ekor)							25.000.000	31.000.000				16.468.950	22.756.800				65,88	73,41
5	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD juta)				9,36	10,92	13			7,9	10,15	6,5			84,4	92,95	50		
6	Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/ th)				42	43	45	47	48	41,5	45,75	45,87	47,04	50,5	98,81	106,4	101,93	100,09	105,21
7	Volume Produksi Olahan (Ton)							19.000	21.000				20.545,80	20.546,00				108,02	162,02

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Nilai Tukar Nelayan (NTN)				118	119	120	107	109	89,73	90,54	102,98	101,44	107,75	76,04	76,08	85,82	94,8	98,85
B.	Fungsi Lingkungan Hidup																		
1	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha)				300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	496.792	496.792	496.792	810.077,71	810.077,71	165,6	141,94	124,2	180,02	162
2	Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang dikonservasi (Pulau)				3	7	7			4	8	11			133,33	114,29	157,14		
3	jumlah Pokmaswas Aktif (Kelompok)							22	30				32	53				145,45	176,67
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA															100,6	94,1	94,1	101,94	106,88

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.722.701.500	3.745.641.000	4.501.605.000	4.388.430.000	5.546.657.000	2.683.778.702	3.065.721.506	3.880.825.435	3.561.630.268	4.420.062.598	72,09	81,85	86,21	81,16	79,69	364.791.100	347.256.779
Penyediaan jasa surat menyurat	11.880.000	10.980.000	15.390.000	15.390.000	15.390.000	6.488.290	4.142.801	6.124.600	5.959.380	10.188.935	54,62	37,73	39,80	38,72	66,20	702.000	740.129
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	250.000.000	250.000.000	244.800.000	183.000.000	244.800.000	130.089.621	145.506.301	140.608.047	173.039.112	147.636.333	52,04	58,20	57,44	94,56	60,31	(1.040.000)	3.509.342
Penyediaan jasa administrasi keuangan	141.324.000	156.600.000	178.920.000	447.300.000	386.690.000	84.720.000	138.600.000	166.680.000	331.300.000	253.710.000	59,95	88,51	93,16	74,07	65,61	49.073.200	33.798.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	159.450.000	181.182.000	229.000.000	27.100.000	32.056.000	152.830.000	175.781.000	227.484.200	24.982.000	32.056.000	95,85	97,02	99,34	92,18	100,00	(25.478.800)	(24.154.800)
Perbaikan peralatan kerja	16.720.000	25.720.000	80.000.000	90.000.000	90.000.000	16.715.000	18.905.000	60.710.000	63.987.000	39.010.500	99,97	73,50	75,89	71,10	43,35	14.656.000	4.459.100
Penyediaan Alat Tulis Kantor	67.140.000	153.000.000	160.000.000	170.540.000	185.000.000	67.140.000	151.190.000	159.999.750	170.540.000	184.999.700	100,00	98,82	100,00	100,00	100,00	23.572.000	23.571.940
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	52.000.000	52.000.000	55.000.000	65.000.000	65.000.000	51.996.000	51.393.500	53.778.000	52.025.000	59.244.050	99,99	98,83	97,78	80,04	91,14	2.600.000	1.449.610
Penyediaan komponen instansi listrik/Penerangan Kantor	2.400.000	4.800.000	2.500.000	3.750.000	15.000.000	2.395.000	4.772.000	2.499.500	3.743.000	15.000.000	99,79	99,42	99,98	99,81	100,00	2.520.000	2.521.000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	15.120.000	15.120.000	7.920.000	7.920.000	7.920.000	7.744.000	14.760.000	5.402.000	6.069.000	6.624.000	51,22	97,62	68,21	76,63	83,64	(1.440.000)	(224.000)
Penyediaan Makan dan Minuman		50.000.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000	-	38.039.000	22.141.125	16.567.000	13.275.500		76,08	41,78	31,26	25,05	10.600.000	2.655.100
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	401.125.000	480.000.000	700.000.000	586.000.000	300.000.000	395.471.600	470.095.220	699.999.998	344.069.529	293.260.817	98,59	97,94	100,00	58,71	97,75	(20.225.000)	(20.442.157)
Penyediaan jasa penunjang pengelolaan administrasi perkantoran	18.200.000	20.800.000	21.450.000	1.158.300.000	743.690.000	16.900.000	19.500.000	21.450.000	1.156.650.000	743.690.000	92,86	93,75	100,00	99,86	100,00	145.098.000	145.358.000
Operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)Pemali	550.288.000	554.310.000	891.115.000	400.000.000	714.600.000	522.493.699	498.881.884	848.151.091	319.042.647	678.071.527	94,95	90,00	95,18	79,76	94,89	32.862.400	31.115.566
Operasional Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak	422.600.000	200.000.000	273.400.000			223.204.200	98.650.000	242.242.100			52,82	49,33	88,60			(49.733.333)	6.345.967
Operasional Balai Benih Ikan Air Payau (BBAP) Tanjung Krasak	0	0	0	321.650.000	527.320.000	0	-	0	211.013.263	494.008.058				65,60	93,68	102.835.000	141.497.398
Operasional Balai Benih Ikan Pantai (BBIP)Tanjung Rusa	525.052.500	449.169.000	616.200.000			440.584.000	411.278.000	538.245.054			83,91	91,56	87,35			30.382.500	32.553.685
Operasional Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa				456.650.000	793.960.000				403.509.153	688.700.423				88,36	86,74	168.655.000	142.595.635

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Operasional BOOST Center	170.528.000	279.160.000	212.260.000	57.100.000	183.800.000	103.430.692	189.227.200	152.862.800	26.183.200	134.687.300	60,65	67,78	72,02	45,85	73,28	2.654.400	6.251.322
Operasional Kapal Catamaran	26.410.000					26.410.000			-		100,00					-	-
Operasional Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)	692.464.000	574.600.000	620.050.000	266.530.000	398.671.000	395.566.600	400.592.600	419.509.670	223.897.984	315.151.183	57,12	69,72	67,66	84,00	79,05	(58.758.600)	(16.083.083)
Operasional Kapal Setuhuk	200.000.000	288.200.000	140.600.000	79.200.000		39.600.000	234.407.000	112.937.500	29.053.000		19,80	81,33	80,33	36,68		(30.200.000)	(2.636.750)
Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah					150.000.000					147.025.032					98,02	-	-
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					639.760.000					163.723.240					25,59	-	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.106.740.000	1.306.540.000	750.225.000	1.723.112.753	2.003.545.000	1.427.394.853	1.195.159.371	572.501.937	1.401.380.494	1.186.880.600	67,75	91,48	76,31	81,33	59,24	(20.639.000)	(48.102.851)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	400.000.000	300.000.000	341.920.000	590.642.753	456.805.000	380.241.000	289.370.000	272.371.500	578.800.000	237.850.000	95,06	96,46	79,66	97,99	52,07	11.361.000	(28.478.200)
Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan	52.800.000	250.000.000				51.125.000	214.189.900				96,83	85,68				98.600.000	81.532.450
Pengadaan Kebutuhan Listrik untuk Balai Benih Ikan Pantai (BBIP)	500.000.000	500.000.000				-	489.629.000					97,93				-	244.814.500

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	300.000.000					214.712.700					71,57	-				-	-
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional kantor	253.940.000	256.540.000	393.305.000	471.780.000	490.570.000	205.687.453	201.970.471	287.938.437	235.538.960	229.183.400	81,00	-	73,21	49,93	46,72	47.326.000	4.699.189
Rehab Kolam Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)	400.000.000					378.465.000					94,62	-				-	-
Pembuatan Pagar Kantor Dinas	200.000.000				80.000.000	197.163.700				79.669.700	98,58	-				(60.000.000)	(58.747.000)
Pengadaan Mesin Pompa dan Tandon			15.000.000					12.192.000					81,28			-	-
Pengadaan Genset				200.000.000					197.522.000					98,76		-	-
Pengadaan Perlengkapan Prasarana LPPMHP				200.840.000					175.042.684					87,16		-	-
Pengadaan Kebutuhan Listrik PLN untuk UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP)				259.850.000					214.476.850					82,54		-	-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehab gedung kantor					56.170.000					43.980.000					78,30	-	-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehab					220.000.000					-					0,00	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
UPTD BBIS Pemali																	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehab UPTD BBIAP Tanjung Krasak					220.000.000					218.905.000					99,50	-	-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehab UPTD BBIL Tanjung Rusa					220.000.000					216.785.500					98,54	-	-
Pengadaan Space Baleho					50.000.000					44.880.000					89,76	-	-
Perbaikan Instalasi Listrik Kantor					90.000.000										0,00	-	-
Pengadaan Partisi Ruangan Resepsionis					120.000.000					115.627.000					96,36	-	-
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	368.180.000	14.340.000	0	213.200.000	115.000.000	302.748.050	14.340.000	-	200.600.000	113.500.000	82,23	100		94,09	98,70	(63.295.000)	(47.312.013)
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	306.990.000	14.340.000		193.200.000	115.000.000	242.817.000	14.340.000		181.600.000	113.500.000	79,10	100		94,00	98,70	(47.997.500)	(32.329.250)
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	61.190.000					59.931.050					97,94	-				-	-
Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggar				20.000.000					19.000.000			-		95,00		-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
an Responsif Gender																	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBA NGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	227.966.000	0	0	0	0	177.007.500	0	-	-	-	77,65	-				-	-
Penyusunan laporan Tahunan Dinas dan Monev serta Koordinasi	227.966.000					177.007.500	0				77,65					-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	800.000.000	0	0	0	0	201.232.500	0		-		25,15					-	-
Kajian Zonasi Kelautan	800.000.000					201.232.500	0				25,15					-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN	52.900.000	0	0	0	0	52.800.000	-		-		99,81					-	-
Pemeliharaan Kapal Catamaran	0					-										-	-
Pemeliharaan Kapal Setuhuk	52.900.000					52.800.000					99,81					-	-
PROGRAM PENINGKATAN	165.000.000	0	0	0	0	149.985.000	-		-	-	90,90					-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KEGIATAN BUDIDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT																	
Gelar Hari Nusantara	165.000.000					149.985.000					90,90					-	-
PROGRAM PENGEMBA NGAN PERIKANAN TANGKAP	7.013.699.000	19.824.323.000	1.476.101.000	4.738.806.600	1.431.601.750	6.606.541.400	17.824.530.600	1.016.875.000	903.753.500	1.244.735.985	94,19	89,91	68,89	19,07	86,95	(1.116.419.450)	(1.072.361.083)
Pengadaan Kapal Nelayan	6.459.160.000					6.052.002.400					93,70					-	-
Pembangun an tambat labuh (untuk pembayaran utang TA 2009 kepada CV.Terkas Daya Mandiri)	554.539.000					554.539.000					100,00					-	-
Pengadaan Kapal Nelayan		6.377.023.000					6.130.352.700			-		96,13				-	-
Pengelolaan Sumber Daya Ikan		0		300.000.000			-		248.739.200			-		82,91		-	-
Peningkata n Kesejahtera an Nelayan		640.000.000	401.650.000	250.000.000	354.190.000		-	322.514.500	216.379.800	335.828.950		0,00	80,30	86,55	94,82	(71.452.500)	83.957.238
Peningkata n Kualitas SDM Perikanan Tangkap		200.000.000	121.596.000	185.000.000	513.382.000		181.322.500	120.095.100	153.353.700	414.810.028		90,66	98,77	82,89	80,80	78.345.500	58.371.882
Pengadaan Sarana Alat Tangkap Ikan		1.700.000.000					1.497.204.500		-	-		88,07				-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sosialisasi dan Koordinasi Peraturan Perundang-undangan dan Permen Tentang Usaha Perikanan Tangkap dengan Pengusaha Perikanan Tangkap		49.250.000					47.195.400		-			95,83				-	-
Pengadaan Buku SOP Perizinan, Blanks dan Hologram dan Nomor Seri		50.000.000	60.000.000	237.060.000	304.959.750		36.200.000	57.358.700	206.324.000	242.408.827		72,40	95,60	87,03		63.739.938	51.552.207
Dukungan Pelayanan Perizinan Kapal Perikanan Ukuran 30 - 60 GT (Pengadaan Internet, Komputer & Blanko Form Izin)		33.050.000					31.033.000					93,90				-	-
Pengadaan Bantuan Kapal Penangkap Ikan Ukuran 7 GT		10.775.000.000					9.901.222.500					91,89				-	-
Profil Perikanan Tangkap Prov. Kep. Babel			168.960.000					138.490.000					81,97			-	-
Pembekalan Keselamatan Nelayan			238.495.000					234.173.700					98,19			-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bimtek Cek Fisik Kapal Tingkat Provinsi			140.150.000					125.453.000					89,51			-	-
Rehab Dermaga Nelayan Kurau			345.250.000					18.790.000					5,44			-	-
Pengadaan Bubu				1.233.156.060					24.857.000					2,02		-	-
Pengadaan Mesin Tempel				2.442.960.000					8.307.000					0,34		-	-
Penyusunan DED Pelabuhan Tambat Labuh di Tanjung Binga dan Jelitik				90.630.000					45.792.800					50,53		-	-
Pengelolaan data statistik perikanan tangkap provinsi					259.070.000					251.688.180					97,15	-	-
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	150.000.000	0	0	0	0	143.283.600	-		-		95,52			-		-	-
Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi	150.000.000					143.283.600					95,52					-	-
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN TEKNIK DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA	0	377.350.000	325.880.000	648.755.000	1.146.280.000		373.414.900	310.529.500	619.255.503	1.034.574.170		98,96	95,29	95,45	90,25	192.232.500	165.289.818

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Monev Pembangunan Kelautan dan Perikanan		377.350.000	325.880.000	568.755.000	525.940.000		373.414.900	310.529.500	543.401.803	487.442.020		98,96	95,29	95,54	92,68	37.147.500	28.506.780
Review Renstra Dinas				80.000.000					75.853.700					94,82		-	-
Tinjauan Lapangan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung					239.370.000					235.866.500					98,54	-	-
Sosialisasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan					215.970.000					212.285.020					98,29	-	-
Penilaian Angka Kredit JFT Pengawasan Perikanan					75.000.000					25.570.900					34,09	-	-
Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan dan Protokol					90.000.000					73.409.730					81,57	-	-
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	0	200.000.000	0	0	0		0		-		-	0					
Identifikasi dan Sertifikasi		200.000.000					0					0,00				-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tanah Milik Pemerintah Daerah																	
PROGRAM PENGEMBA NGAN BUDIDAYA PERIKANAN	0	748.385.000	350.085.000	3.867.000.000	8.425.880.000		570.505.100	272.987.500	1.868.573.200	4.248.467.080	-	76,23	77,98	48,32	50,42	1.919.373.750	919.490.495
Pengadaan Kebutuhan Lab.BBIS Pemali		262.975.000					205.330.000					78,08				-	-
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan		235.410.000					120.238.900					51,08				-	-
Pengembangan Sistem Perbenihan		0														-	-
Profil Perikanan Budidaya Bangka Belitung		250.000.000					244.936.200					97,97				-	-
Supervisi dan Pembinaan Pemanfaatan Kredit			43.642.500				14.100.000						32,31			-	-
Penilaian Pendahuluan CBIB			22.300.000				22.277.100						99,90			-	-
Penyusunan Peta Penyebaran Hama dan Penyakit Ikan			85.730.000				74.172.500						86,52			-	-
Pengadaan Bahan Promosi Perikanan Budidaya			54.825.000				54.825.000						100,00			-	-
Dukungan Forum Koordinasi Statistik Perikanan Budidaya			62.485.000				55.635.400						89,04			-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tk. nasional Tahun 2014 di Belitung																	
Pelatihan Budidaya Air Tawar			81.102.500					51.977.500					64,09			-	-
Pengadaan Induk Kerapu untuk BBIL				625.560.000					503.387.000					80,47		-	-
Pembesaran Kolam UPTD BBIAP Tanjungkrasak				132.470.000					71.520.000					53,99		-	-
Pengadaan Bibit Ikan (Nila, Lele, Baung)				519.960.000					55.105.600					10,60		-	-
Percontohan Budidaya Lele dalam Wadah Terpal				204.950.000					35.452.000					17,30		-	-
Percontohan Budidaya Rumput Laut				237.820.000					15.550.000					6,54		-	-
Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIS Pemali				220.000.000	1.866.358.000				168.870.000	60.783.400				76,76		823.179.000	(54.043.300)
Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIL Tanjungrusa				1.226.274.000	2.959.340.000				335.718.600	972.508.700				27,38		866.533.000	318.395.050
Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIAP Tanjungkrasak				699.966.000	2.213.702.000				682.970.000	2.142.255.786				97,57		756.868.000	729.642.893
Pengembangan dan					154.970.000					154.359.600					99,61	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatn Sistem Penyuluhan Perikanan																	
Pelatihan Calon Auditor CBIB					190.000.000					139.097.086					73,21	-	-
Pembina Mutu Pembenihan					200.000.000					42.232.146					21,12	-	-
Penyusunan Data Statistik Perbenihan Tingkat Provinsi					77.080.000					65.073.562					84,42	-	-
Penguatan Kapasitas Kelembagaan POKDAKAN					96.150.000					64.292.600					66,87	-	-
Pengembangan Air Baku UPTD BBIS Pemali					350.000.000					348.410.000					99,55	-	-
Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan					318.280.000					259.454.200					81,52	-	-
PROGRAM PENGEMBA NGAN PENGOLAH AN DAN PEMASARA N PRODUK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	3.027.450.000	677.440.000	3.321.530.000	2.045.750.000		626.196.725	471.997.100	1.016.772.444	1.277.116.765	-	20,68	69,67	30,61	62,43	(245.425.000)	162.730.010
Monev Dampak Pelaksanaa n PUMP P2HP di Prov. Kep Bangka		33.875.000					32.098.000					94,75				-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belitung																	
Pameran Industri Kelautan dan Perikanan di Luar Daerah		273.450.000	198.750.000	235.000.000	431.400.000		138.955.000	61.750.000	144.795.600	258.603.100		50,82	31,07			39.487.500	29.912.025
Pendataan UMKM Sektor Kelautan dan Perikanan Bidang P2HP		39.750.000					-					0,00				-	-
Pengadaan Bantuan Peralatan dan Pengolahan Hasil Perikanan		1.687.080.000		477.420.000			-		4.541.000			0,00				(604.830.000)	2.270.500
Lomba Masak Ikan Tk. Provinsi dan Nasional		300.000.000	236.680.000	282.140.000			263.062.000	212.338.000	248.494.875			87,69	89,72			(5.953.333)	(4.855.708)
Profil Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Bangka Belitung Tahun 2012		250.000.000					-					0,00				-	-
Temu Koordinasi UMLKM, KK MB (Tenaga Pendamping) dan Pihak Perbankan		53.295.000					-					0,00				-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sosialisasi tentang Pengawasan Bahan Baku Kimia Berbahaya terhadap Produk Perikanan dan Pembinaan Mutu Bagi Pengolah dan Pemasar		305.000.000					192.081.725					62,98				-	-
Identifikasi Keragaman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		85.000.000					-					0,00				-	-
Peningkatan Kapasitas LPPMHP			137.900.000	336.970.000	389.255.000			101.802.600	291.573.269	335.171.664			73,82	86,53		83.785.000	77.789.688
Sertifikasi SKP untuk UPI Se Prov Kep. Babel			104.110.000		165.460.000			96.106.500		99.831.900			92,31			30.675.000	1.862.700
Pelatihan Pengembangan Produk Bernilai Tambah (PPNT)				210.000.000					139.417.700					66,39		-	-
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemasaran				200.000.000					187.950.000					93,98		-	-
Kegiatan Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan				1.580.000.000					0					0,00		-	-
Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se-Bangka Belitung					38.920.000					35.121.604					90,24	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan					629.265.000					393.378.133					62,51	-	-
Workshop Perhitungan Angka Konsumsi Ikan untuk Dua Semester					42.390.000										0,00	-	-
Pembinaan Pengembangan Produk Konsumsi bagi Pelaku Usaha Produk Olahan Hasil Perikanan dan Masyarakat					123.630.000					73.033.900					59,07	-	-
Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Non-Konsumsi					123.630.000					-					0,00	-	-
Pendataan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan					101.800.000					81.976.464					80,53	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU PULAU	0	2.463.049.500	1.120.460.000	1.242.940.000	4.986.870.000		2.071.306.200	506.975.110	993.210.200	4.159.404.080	-	84,10	45,25	79,91	83,41	630.955.125	522.024.470

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KECIL SERTA PENGAWASAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA IKAN																	
Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Ikan dan Ekosistem Laut		476.499.500					325.111.500					68,23				-	-
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		1.445.260.000					1.251.905.400					86,62				-	-
Peningkatan Wawasan Nusantara		195.440.000	195.550.000				172.802.500	187.293.910				88,42				55.000	7.245.705
Pemetaan SIG (Sistem Informasi Geografis) Kelautan dan Perikanan Kep. Bangka Belitung		345.850.000					321.486.800					92,96				-	-
Identifikasi Terumbu Karang, Lamun, Mangrove di Prov. Kep. Babel			508.779.000					21.869.200					4,30			-	-
Prolegda RZWP3K Prov. Kep. Babel			177.681.000					144.950.000					81,58			-	-
Penyelesaian Tindakan Pidana Kelautan dan Perikanan			63.500.000	100.000.000				-	86.553.300				0,00			18.250.000	43.276.650
Pembentuk			54.950.000					47.952.000					87,26				

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
an POKMASWA S																-	-
Peningkata n kualitas SDM Pengawasan dan PPNS Perikanan			120.000.00 0					104.910.000					87,43			-	-
Pengemban gan Sarana dan Prasarana Pengawasan				280.000.000	3.700.950.0 00				233.835.400	3.547.210.2 40				83,51		1.710.475.0 00	1.656.687.4 20
Pengemban gan Alat Bantu Pokmaswas				240.000.000					192.135.000					80,06		-	-
Inventarisas i Dokumen Teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil (RZWP3K)				85.000.000					53.564.800					63,02		-	-
Sadar Bersih Laut				337.940.000					268.265.900					79,38		-	-
Fasilitasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut				200.000.000					158.855.800					79,43		-	-
[2.05.2.05.0 1.27.2800] - Penyusuna n Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan					980.000.000					326.806.400					33,35	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bangka Belitung Tahun 2016																	
[2.05.2.05.01.27.3000] - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Ruang Laut					305.920.000					285.387.440					93,29	-	-
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	236.000.000	0	0		-	73.987.500			-	0	31,35			-	-
Pengelolaan Kepegawaian dan Barang DKP			30.000.000					28.196.400					93,99			-	-
Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan			46.000.000					45.791.100					99,55			-	-
Diklat Fungsional			160.000.000										0,00			-	-
TOTAL	14.607.186.500	31.707.078.500	9.437.796.000	20.143.773.813	25.701.583.750	11.744.771.605	25.741.174.402	7.106.679.082	10.565.175.609	17.684.741.278	80,40	81,18	75,30	52,45	68,81	2.218.879.450	1.187.993.935

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui *Review* Pencapaian Kinerja Pelayanan dan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan PD yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 - 2016, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya manajemen kegiatan, dimana PPTK kegiatan belum seluruhnya dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- b. Masih adanya kendala dalam penentuan calon penerima untuk kegiatan yang diserahkan kepada masyarakat yang mengakibatkan DPA terlambat diterbitkan dan dilaksanakan.
- c. Belum selesainya Dokumen Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- d. Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap dan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Hasil Produksi Perikanan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum tergabung dalam koperasi atau memiliki badan hukum yang jelas. Hal ini menyulitkan DKP dalam menyalurkan bantuan sosial karena merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014 pasal 298 ayat (5) yaitu kriteria penerima belanja hibah diantaranya Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Kendala Pencapaian Indikator Kinerja Utama 2012-2016

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU di atas antara lain disebabkan oleh belum optimalnya pembangunan di beberapa subsektor, yaitu:

1. Subsektor perikanan budidaya, dengan indikator jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah benih yang dihasilkannya. Teridentifikasi kendala yang dihadapi yaitu masih rendahnya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan budidaya ikan dikarenakan lamanya waktu

panen dan adanya potensi gagal panen. Selain itu, mahal biaya operasional budidaya seperti harga pakan dan induk unggul juga ikut mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan usaha budidaya perikanan. Terlebih lagi, dengan terbitnya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada pasal 298 ayat (5) yaitu kriteria penerima belanja hibah diantaranya Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang menyebabkan agak terkendalanya pelaksanaan bantuan sarana prasarana langsung budidaya ke masyarakat, karena kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) belum tergabung dalam wadah koperasi sebagai syarat menerima bantuan.

2. Subsektor perikanan tangkap, dengan indikator nilai tukar nelayannya. Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan persentase perbandingan antara indeks pendapatan dan indeks pengeluaran nelayan. Jika NTN nelayan adalah 100, maka ini mengandung arti jika nelayan tersebut tidak dapat melakukan penyimpanan (**saving**) atas pendapatan yang diperolehnya. Oleh karena itu target nilai NTN yang ada di Renstra DKP adalah di atas 100 secara indeks. Setelah melalui pengamatan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dirasakan bahwa target NTN yang selama ini ditetapkan cukup tinggi untuk dicapai. Diperlukan penataan ulang pada besaran NTN untuk Renstra DKP 2017-2022 jika nantinya indikator ini akan tetap dijadikan acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan sub sektor perikanan tangkap.
3. Subsektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan indicator sebagai berikut :
 - a. Nilai ekspor hasil perikananannya. Indikator ini cukup sulit tercapai karena tingginya target IKU yang disepakati. Beberapa hal yang menyebabkan sulitnya pencapaian target IKU ini adalah belum optimalnya fungsi pencatatan ekspor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlebih lagi masih maraknya perdagangan

antar pulau untuk komoditi perikanan. Sebagai contoh, masih banyaknya hasil produk pengolahan yang diekspor bukan melalui gerbang Bangka Belitung, tetapi melalui gerbang Kepulauan Riau. Hal ini dimungkinkan karena hubungan dagang yang terjadi antara pengusaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

- b. Volume Produksi Olahan (ton). realisasi Volume Produksi Olahan (ton) pada tahun 2016 mencapai 20.546 ton, belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 21.000 ton, sehingga perlu didukung oleh sarana dan prasarana kepada kelompok pengolah agar memudahkan dalam proses produksi olahan yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan para pengolah dan adanya pembinaan dan pendampingan yang rutin kepada kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHASAR). Berdasarkan data pada Tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 2.130 UPI dengan jumlah tenaga kerja unit pengolahan ikan sebanyak 2.239 orang yang terdiri dari 672 orang laki-laki dan 1.567 orang perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan mempunyai kesempatan akses yang sama dengan laki-laki untuk bekerja di sektor Pengolahan Hasil Perikanan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kelautan dan Perikanan

2.4.1 Tantangan Pengembangan

1. Relatif Lambatnya perkembangan teknologi produksi baik perikanan tangkap, Budidaya, ataupun pengolahan dan pemasaran;
2. Belum selesainya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
3. Terus menurunnya tingkat harga jual beberapa komoditi utama dimana pada saat bersamaan, tingkat harga input produksi utama seperti bahan bakar minyak dan sarana produksi lainnya cenderung terus meningkat;
4. Ketidadaan Pasar atau sulitnya pemasaran produk hasil perikanan;
5. Kurangnya pasokan bibit dan benih, serta harga pakan yang relatif mahal, sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas bagi pembudidaya dalam pengelolaan pakan, serta dukungan pemerintah untuk memanfaatkan hasil dari berbagai kegiatan perikanan seperti pemanfaatan ikan rucah sebagai pakan ikan dan pemanfaatan silase ikan untuk sumber protein hewani pakan dan Sektor Perikanan masih dianggap hanya usaha sampingan.

2.4.2 Peluang Pengembangan

1. Usaha penangkapan ikan berupa penambahan maupun peningkatan kapasitas armada dan alat tangkap;
2. Usaha *docking, perbaikan dan perbengkelan armada tangkap berupa* penambahan unit maupun optimalisasi *dock-dock tradisional maupun yang telah ada namun tidak digunakan;*
3. Usaha penyedia input produksi perikanan tangkap seperti alat tangkap, mesin, suku cadang, air tawar, BBM, perbekalan, garam, keranjang ikan, pabrik es;
4. Usaha penyedia pasca produksi perikanan tangkap seperti penyewaan *coldstorage, pergudangan dan transportasi;*
5. Usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan seperti alat pengolahan ikan, bahan tambahan untuk pengolahan, alat pengemasan, serta jaringan distribusi;

6. Budidaya kerang-kerangan sudah mulai dilakukan walaupun belum menggunakan teknologi yang memadai, masih menggunakan teknik sederhana, namun budidaya komoditas ini sangat prospektif, mengingat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki daerah perairan pantai yang luas.
7. Sepat Kerang Mutiara merupakan anakan kerang mutiara sebelum dibesarkan menjadi kerang mutiara yang menghasilkan mutiara. Perairan Belitung sangat cocok untuk membesarkan sepat mutiara sampai ukuran diameter 5-7 cm. Umumnya sepat hasil budidaya dikirim ke wilayah Jakarta dan Lombok untuk dibesarkan menjadi kerang penghasil mutiara.
8. Kerang Darah di Kabupaten Bangka Barat sedang dalam pengembangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi dan didukung dengan kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*), maka permasalahan yang sering dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membangun sektor kelautan dan perikanan dapat dilihat seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih rendahnya produktifitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya	Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung produksi	Kemampuan nelayan untuk menambah sarana dan prasarana belum optimal
2.	Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing;	Masih terbatasnya informasi untuk berinovasi dalam mengolah produk	Pembinaan terhadap nelayan dalam mengolah produk hasil perikanan belum optimal
3.	Masih rendahnya akses permodalan untuk pengembangan usaha	Masih rendahnya posisi tawar pelaku usaha kelautan dan perikanan	Masih terbatasnya bahan yang dapat digunakan untuk memperoleh tambahan modal dari perbankan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Terjadinya konflik kepentingan antar sektor contoh sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir;	Masih belum terpetakannya zona pemanfaatan ruang yang berada di laut dan pesisir	RZWP3K dan rencana alokasi ruang belum terealisasi
5.	Kawasan pengembangan khusus kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW belum dapat dibangun secara optimal	Masih terbatasnya sinergitas pembangunan antar sektor	Koordinasi dan sinergitas program yang masih rendah antar stakeholder
6.	Masih maraknya kegiatan <i>illegal unregulated and unreported fishing</i> di wilayah perairan provinsi kepulauan Bangka Belitung;	Masih belum optimalnya upaya pengawasan SDKP	Sarpras dan aparat yang belum tersedia cukup di lapangan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diinformasikan bahwa terdapat 4 aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yang sering kali dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dari aspek pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS. Adapun yang menjadi permasalahan di dalam ketiga aspek ini dirumuskan ke dalam 6 permasalahan utama, yaitu masih rendahnya produktifitas perikanan tangkap maupun perikanan

budidaya, belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing, masih rendahnya akses permodalan untuk pengembangan usaha, terjadinya konflik kepentingan antar sektor, contoh : sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir, Kawasan pengembangan khusus kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW belum dapat dibangun secara optimal dan masih maraknya kegiatan *illegal unregulated and unreported fishing* di wilayah perairan provinsi kepulauan Bangka Belitung.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan tetap merujuk pada Visi, Misi serta Program Prioritas Kepala Daerah yang tercantum di dalam dokumen RPJMD 2017-2022. Visi, Misi dan Program Prioritas ini merupakan asimilasi antara janji politik Kepala Daerah selama masa kampanye dengan rancangan awal RPJMD yang disusun oleh tim penyusun RPJMD yang dikoordinir oleh Bappeda.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan tetap mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2017-2022, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memiliki visi dan misi tersendiri yang berbeda dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini Dinas Kelautan akan menjunjung tinggi Visi Kepala Daerah yaitu “**Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi**” dan berkontribusi secara lebih spesifik untuk memenuhi **Misi ke-1**, yaitu **Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah dengan sasaran RPJMD yang ke-2**, yaitu **Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan**, **ke-5**, yaitu **Meningkatnya pembangunan berbasis industri**, **ke-7**, yaitu **Meningkatnya**

belanja pemerintah Daerah, **ke-8**, yaitu Menurunnya angka Pengangguran dan **ke-10**, yaitu Menurunnya angka inflasi.

Dalam pencapaian visi, misi dan sasaran di atas tentunya Dinas Kelautan dan Perikanan harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan perangkat daerah, maka Dinas mengidentifikasi 3 permasalahan utama, yaitu produksi, nilai tambah serta akses permodalan, sedangkan berdasarkan arahan RPJMD 2017-2022, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah konflik kepentingan antar sektor. Untuk telaahan berdasarkan arahan RTRW, maka permasalahan yang dihadapi adalah pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang belum optimal dan dari sisi arahan KLHS maka permasalahan yang masih dihadapi adalah praktek *IUU Fishing*. Secara lebih lengkap informasi mengenai faktor penghambat serta pendorong dari masing-masing permasalahan untuk tiap kajian tadi ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No	Misi dan Program /Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-1 Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah; Sasaran ke-2: <i>Meningkatnya produksi sub sektor perikanan</i>	Masih rendahnya produktifitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya	- Masih terbatasnya jenis dan ukuran sarana dan prasarana perikanan tangkap	- Luas perairan yang masih belum tergarap dan besarnya jumlah nelayan yang ada

Visi: **Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi**

No	Misi dan Program /Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Masih rendahnya akses permodalan untuk pengembangan usaha Terjadinya konflik kepentingan antar sektor contoh sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir;	- Masih rendahnya kepercayaan bank untuk dapat membantu masyarakat kelautan dan perikanan - Masih belum tersedianya Peraturan Daerah yang mengatur tentang dokumen perencanaan dan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil	- Masyarakat berkeinginan untuk mengembangkan usahanya dengan tambahan modal baik dari pemerintah maupun sumber pembiayaan formal lainnya - Pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan serta pertambangan, khususnya di wilayah laut dan pesisir akan mentati peraturan yang berlaku
		Masih marak terjadinya <i>illegal unregulated and unreported fishing</i> di wilayah perairan provinsi kepulauan Bangka Belitung;	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	- Penegakan hukum di laut menjadi konsen pemerintah pusat dan daerah
2.	Sasaran ke-5: <i>Meningkatnya pembangunan berbasis industri</i>	Belum optimalnya pembangunan Kawasan pengembangan khusus kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW	- Masih belum sinkronnya pembangunan berbasis kawasan	- Penetapan pembangunan berbasis kawasan di dalam RTRW
		Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing;	- Bentuk penyajian/ packaging serta luasan pangsa pasar yang belum optimal	- Produksi perikanan tangkap yang mencukupi kebutuhan bahan baku produk olahan
3.	Sasaran ke-7: <i>Meningkatnya belanja pemerintah Daerah</i>	Pendapatan daerah dari sektor kelautan dan perikanan belum optimal, baik itu dari pendapatan berupa izin kapal maupun retribusi penjualan benih dan sertifikat mutu hasil perikanan	- UPTD balai benih dan Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan belum berkontribusi secara optimal	- Dengan pengelolaan dan penempatan Sumber Daya Manusia yang kompeten maka diharapkan UPTD ini dapat berfungsi secara optimal

Visi: Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No	Misi dan Program /Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Sasaran ke-8: <i>Menurunnya angka Pengangguran</i>	Kegiatan Sektor kelautan dan perikanan belum dianggap sebagai kegiatan yang menjanjikan penghidupan yang layak	- Masih rendahnya minat masyarakat berusaha di bidang kelautan dan perikanan	- Masih rendahnya minat masyarakat berusaha di bidang kelautan dan perikanan
5.	Sasaran ke-10: <i>Menurunnya angka inflasi</i>	Produktivitas yang tinggi tidak akan memberikan manfaat yang besar bagi wilayah Bangka Belitung jika tidak didukung dengan rantai distribusi penjualan yang baik	- Nelayan masih banyak yang menggantungkan hidupnya dari belas kasihan tengkulak	- Pemerintah harus membuat regulasi yang dapat memotong rantai distribusi penjualan yang terlalu panjang

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Analisis Renstra K/L dan PD kabupaten/kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan melihat bahwa memang sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat telah mengusung indikator yang sama. Masing-masing level pemerintah menetapkan target indikator sasarannya dan akan diukur pencapaiannya tiap tahun. Berdasarkan hasil capaian inilah nanti akan ditentukan sasaran yang belum optimal dikerjakan dan usaha apa yang perlu ditempuh untuk memperbaiki keadaan tersebut pada periode renstra 5 tahunan berikutnya.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perikanan Kabupaten/Kota maka dapat ditarik secara garis besar permasalahan yang sama-sama dihadapi dan faktor penghambat serta pendorong penyelesaian permasalahan adalah kurang lebih sama seperti yang disajikan pada sub bab 3.2. di atas. Upaya yang harus ditempuh adalah mensinergikan upaya penyelesaian permasalahan tersebut, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap RTRW dan KLHS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bidang pembangunan kelautan dan perikanan maka dapat ditarik secara garis besar permasalahan yang sama-sama dihadapi dan faktor penghambat serta pendorong penyelesaian permasalahan dimaksud. Secara spesifik, telaahan terhadap RTRW dan KLHS ini adalah mengacu pada penyelesaian permasalahan dengan sasaran ke-5 dari RPJMD yang telah dibahas pada sub bab 3.2 di atas.

Dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) mengisyaratkan bahwa untuk sektor kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menganut pembangunan dengan pendekatan kawasan. Berdasarkan telaahan terhadap dokumen tersebut didapatkan informasi bahwa untuk sektor kelautan dan perikanan terdapat 5 lokasi pembangunan dengan pendekatan kawasan pembangunan, yaitu:

1. Pengembangan kawasan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
2. Pengembangan kawasan strategis Minapolitan Lepar Pongok
3. Pengembangan kawasan strategis Etalase Perikanan Selat Nasik

4. Pengembangan kawasan strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
5. Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar

Kelima kawasan pembangunan ini, nantinya akan dikerjakan tidak hanya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, namun melibatkan antar sektor seperti Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata, Permukiman, Air Bersih, Koperasi, Tenaga Kerja dan lain sebagainya, yang secara keseluruhan sudah masuk di dalam dokumen perencanaan RPJMD 2017-2022.

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Untuk merumuskan isu strategis yang dapat diangkat di dalam dokumen Renstra, dikenal istilah pembobotan. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness and Growth*). Berbagai permasalahan/isu tadi dibobot dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani dan seberapa besar kemungkinannya bahwa isu

tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar dan bersifat membahayakan bagi banyak pihak jika tidak segera ditangani.

Berdasarkan pembahasan tentang permasalahan yang terjadi dari sisi pelayanan perangkat daerah terhadap RPJMD, Renstra KKP dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, RTRW dan KLHS pada Sub Bab 3.2 sampai dengan 3.4, maka didapat 6 permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keenam isu ini kembali akan dibobot dengan metode USG agar diperoleh Isu Strategis yang akan dijawab dalam kurun waktu 5 tahunan periode pembangunan ke depan. Secara lebih lengkap akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 3.3.
Pembobotan Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Kajian

No	Permasalahan	Nilai SkalaBobot (1-5)			Total Skor
		Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Masih rendahnya produktifitas perikanan tangkap maupun perikanan	4	5	5	14
2	Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing	5	4	5	14
3	Masih rendahnya akses permodalan untuk pengembangan usaha	4	5	5	14
4	Terjadinya konflik kepentingan antar sektor contoh sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir;	5	4	4	13
5	Belum optimalnya pembangunan Kawasan pengembangan khusus kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan di dalam	4	4	4	12

No	Permasalahan	Nilai SkalaBobot (1-5)			Total Skor
		Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Masih marak terjadinya <i>illegal unregulated and unreported fishing</i> di wilayah perairan provinsi kepulauan Bangka	4	5	4	13

Hasil pembobotan menunjukkan bahwa terdapat 3 permasalahan yang memiliki jumlah bobot tertinggi dengan nilai **14 poin** yaitu permasalahan nomor 1 , 2 dan 3 dengan variasi bobot angka yang berbeda. Jika kita tilik lebih jauh ternyata ketiga permasalahan ini dapat dijadikan satu bahasa yang lebih sederhana dan diangkat menjadi isu strategis, yaitu **masih rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan**. Selanjutnya, terdapat 2 permasalahan yang memiliki jumlah bobot yang sama juga dengan nilai **13 poin**, yaitu permasalahan nomor 4 dan nomor 6. Kembali, secara garis besar permasalahan ini dapat lebih disederhanakan dan diangkat menjadi satu isu strategis berikutnya, yaitu **masih rendahnya kesadaran pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dalam mentaati peraturan**. Terakhir, permasalahan yang memiliki jumlah bobot terendah, yaitu **12 poin** adalah permasalahan nomor 5. Secara lebih sederhana dapat diangkat menjadi isu strategis yang terakhir, yaitu **masih belum optimalnya pembangunan berbasis pengembangan kawasan kelautan dan perikanan**.

Secara berurutan berdasarkan pembobotan yang telah dilaksanakan seperti pada tabel di atas, maka dapat disampaikan bahwa Isu Strategis Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 adalah:

- 1. Masih rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan**
- 2. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dalam mentaati peraturan**
- 3. Masih belum optimalnya pembangunan berbasis pengembangan kawasan kelautan dan perikanan.**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan.	Wilayah Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terbangun dan dikelola dengan baik (Kab / Kota)	7	7	7	7	7	Wilayah Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terbangun dan dikelola dengan baik (Kab / Kota)	Persentase Wilayah berbasis kelautan dan Perikanan yang terbangun dan dikelola (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatkan Pengawasan terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Wilayah Kelautan dan Perikanan yang terawasi (Kab / Kota)	7	7	7	7	7	Meningkatnya wilayah Kelautan dan Perikanan yang di awasi	Persentase Wilayah perairan Bangka Belitung yang diawasi (%)	15	18	20	23	25
3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di Prov. Kep. Babel	Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Prov. Kep. Babel (%)	6,64	6,75	6,86	6,97	7,08	Meningkatnya Pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan di Prov. Kep. Babel	Pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan per kapita (Juta Rupiah)	76,54	77,74	78,94	80,14	81,34
4	Meningkatkan Pembangunan Berbasis Industri di Bidang Kelautan dan Perikanan							Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan						

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berdasarkan uraian atas tujuan dan sasaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan di atas serta tujuan dan sasaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka dapat ditarik satu garis yang linear antara keduanya. Secara lebih jelas akan digambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas

No	RPJMD		Renstra Dinas	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1.	1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	2 Meningkatkan produksi Sub Sektor perikanan	1. Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan.	Wilayah berbasis kelautan dan perikanan yang dapat dibangun dan dikelola dengan baik
			2. Meningkatkan Pengawasan terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya wilayah Kelautan dan Perikanan yang di awasi
			3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di Prov. Kep. Babel	Meningkatnya Pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan di Prov. Kep. Babel
		3 Meningkatkan pengembangan Pembangunan pariwisata	1. Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan.	Wilayah berbasis kelautan dan perikanan yang dapat dibangun dan dikelola dengan baik

No	RPJMD		Renstra Dinas	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
		5 Meningkatkan pembangunan berbasis industri	4. Meningkatkan Pembangunan Berbasis Industri di Bidang Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan
2	2 Meningkatkan pendapatan Pemerintah dan masyarakat	7 Meningkatkan belanja pemerintah Daerah	3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di Prov. Kep. Babel	Meningkatnya Pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan di Prov. Kep. Babel
		8 Menurunnya angka Pengangguran		
		10 Menurunnya angka Inflasi		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

VISI : <i>Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi</i>			
MISI 1 : Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan.	Wilayah berbasis kelautan dan perikanan yang dapat dibangun dan dikelola dengan baik	Membangun dan mengelola wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pembangunan dan Pengelolaan berbasis Wilayah dengan mengikutsertakan lintas perangkat daerah dan stakeholder
Meningkatkan Pengawasan terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya wilayah Kelautan dan Perikanan yang di awasi	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha bidang kelautan dan perikanan	Mengendalikan dan mengawasi usaha di bidang kelautan dan perikanan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di Prov. Kep. Babel	Meningkatnya Pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan di Prov. Kep. Babel	Meningkatkan kegiatan produksi di sektor kelautan dan perikanan dari hulu sampai dengan hilir untuk peningkatan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan	Pemanfaatan potensi ekonomi lokal berbasis Kelautan dan Perikanan
		Meningkatkan Standarisasi Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan Pembangunan Berbasis Industri di Bidang Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan dengan skala prioritas	Sarana dan prasarana yang diadakan adalah untuk peningkatan produktifitas yang berkesinambungan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana program dan kegiatan yang disertai dengan gambaran pendanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan ditampilkan di dalam tabel di bawah ini. Secara umum dapat dijelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan akan melaksanakan 10 program untuk kurun waktu 2017-2022, dengan penjelasan 1 program bersifat rutin dan 9 program bersifat mendukung langsung pencapaian sasaran di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022.

Tabel ini menggambarkan juga besaran indikator untuk tiap-tiap program yang diusulkan, bahkan sampai dengan level kegiatan beserta pagu dana indikatif yang dibutuhkan untuk menyelesaikan target yang telah ditetapkan tersebut. Seluruh program dan kegiatan ini ditujukan sebagai upaya nyata mewujudkan Visi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur di Bidang Kelautan dan Perikanan di masa pemerintahan 2017-2022 mendatang. Secara lebih detil akan ditampilkan dalam tabel 6.1 di bawah ini.

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEP. BABEL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2017)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di Prov. Kep. Babel	Meningkatnya Pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan di Prov. Kep. Babel	Pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan per kapita (Juta Rupiah)	011	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			3.612.227.000		4.299.755.000		12.577.218.460		8.117.479.383		8.421.142.710		8.972.199.845		42.387.795.398	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			011		Nilai LAKIP	B	3.612.227.000	BB	4.299.755.000	BB	12.577.218.460	A	8.117.479.383	A	8.421.142.710	AA	8.972.199.845	AA	42.387.795.398		
			01101	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (%)	100	2.114.976.000	100	2.042.844.000	100	3.319.905.960	100	3.485.901.258	100	3.660.196.321	100	3.843.206.137	100	16.352.053.676		
			01102	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (%)	100	980.816.000	100	1.257.740.000	100	6.982.935.500	100	2.082.082.275	100	2.186.186.389	100	2.295.495.708	100	14.804.439.872		
			01103	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkatkan disiplinnya (%)	100	-	100	175.200.000	100	100.000.000	100	235.000.000	100	110.000.000	100	245.500.000	100	865.700.000		
			01104	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkatkan kapasitasnya (%)	100	158.470.000	100	464.608.000	100	1.546.377.000	100	1.623.695.850	100	1.704.880.000	100	1.790.124.000	100	7.129.684.850		
			01105	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (Dokumen)	2	249.315.000	2	237.295.000	2	418.000.000	2	459.800.000	2	505.780.000	2	531.069.000	2	2.151.944.000		
			01106	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (Dokumen)	4	108.650.000	4	122.068.000	4	210.000.000	4	231.000.000	4	254.100.000	4	266.805.000	4	1.083.973.000		
			211	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP			1.075.063.600		8.150.440.900		28.485.000.000		35.750.000.000		42.715.000.000		45.580.000.000		160.680.440.900		
					Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	181.000	329.908.000	211.300	6.026.470.900	215.300	20.945.000.000	219.300	25.370.000.000	223.300	31.935.000.000	227.300	32.160.000.000	227.300	116.436.470.900		
	Peningkatan dan Pengembangan PPI	Jumlah PPI yang ditingkatkan dan dikembangkan (PPI)	-	-	1	3.158.715.900	4	6.300.000.000	2	2.500.000.000	4	8.500.000.000	2	3.500.000.000	13	23.958.715.900					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2017)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Lokasi	
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Pengadaan Kapal Perikanan Tangkap Lengkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Kapal)	-	-	12	1.748.460.000	20	10.500.000.000	22	15.000.000.000	22	15.500.000.000	25	17.000.000.000	101	59.748.460.000		
					pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	-	-	1.010	1.119.295.000	1.020	3.660.000.000	1.050	7.320.000.000	1.050	7.320.000.000	1.400	10.980.000.000	5.530	30.399.295.000		
					Pemantauan dan evaluasi kesesuaian sarana dengan aktivitas nelayan	Jumlah Nelayan yang dipantau dan dievaluasi kesesuaian sarana dengan Aktivitas perikanan Tangkap (Orang)	-	-	-		85	90.000.000	90	110.000.000	95	130.000.000	100	150.000.000	370	480.000.000		
					Peningkatan Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap	Jumlah Rekomendasi Teknis Penerbitan Perizinan (Rekomendasi)	-	-	-		300	275.000.000	300	300.000.000	300	325.000.000	300	350.000.000	1.200	1.250.000.000		
					Temu Nelayan Nusantara	Terselenggaranya Pelaksanaan Temu Nelayan Nusantara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kegiatan)	-	-	-		-								-	-		
					peningkatan fungsi syahbandar pelabuhan perikanan	Jumlah bulan layanan fungsi syahbandar pelabuhan perikanan (Bulan)	12	329.908.000	-	-	12	120.000.000	12	140.000.000	12	160.000.000	12	180.000.000	12	600.000.000		
						Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	107	745.155.600	108	-	109	2.400.000.000	110	2.500.000.000	111	2.600.000.000	112	2.700.000.000	112	10.200.000.000		
					Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	Jumlah Nelayan yang dibantu sarana dan prasarananya (Orang)	10.000 Data Kartu Nelayan, 10.000 Data Asuransi Nelayan, 700 SeHat Nelayan	745.155.600	-		700	2.400.000.000	700	2.500.000.000	700	2.600.000.000	700	2.700.000.000	2.800	10.200.000.000		
						Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap (%)	-		6,79	182.230.000	6,82	500.000.000	6,84	600.000.000	6,86	700.000.000	6,87	800.000.000	6,87	2.782.230.000		
					peningkatan kualitas SDM perikanan tangkap	Jumlah SDM Perikanan Tangkap yang dibina (Orang)	-	-	50	116.300.000	70	250.000.000	70	300.000.000	70	350.000.000	70	400.000.000	330	1.416.300.000		
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Jumlah Nelayan yang dibina (Orang)	-	-	25	65.930.000	70	250.000.000	70	300.000.000	70	350.000.000	70	400.000.000	305	1.365.930.000							
					Pertambahan pendapatan asli daerah dari layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Juta Rupiah)	-	-	368	1.941.740.000	388	2.200.000.000	406	2.400.000.000	463	2.600.000.000	468,00	2.600.000.000	2.091	11.741.740.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2017)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Jumlah layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Bulan Layanan)	-	-	12	1.941.740.000	12	2.200.000.000	12	2.400.000.000	12	2.600.000.000	12	2.600.000.000	60	11.741.740.000		
						Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di kawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu Teluk Klabat (Ton)				-	2.750	610.000.000	3.000	1.220.000.000	3.250	1.220.000.000	3.550	1.830.000.000	12.550	4.880.000.000		
						pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	-	-		170	610.000.000	175	1.220.000.000	175	1.220.000.000	210	1.830.000.000	730	4.880.000.000		
						Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok (Ton)				-	19.500	610.000.000	22.500	1.220.000.000	26.500	1.220.000.000	31.000	1.830.000.000	99.500	4.880.000.000		
						pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	-	-		170	610.000.000	175	1.220.000.000	175	1.220.000.000	210	1.830.000.000	730	4.880.000.000		
						Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di kawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik (Ton)				-	33.000	610.000.000	35.000	1.220.000.000	37.000	1.220.000.000	39.000	1.830.000.000	144.000	4.880.000.000		
						pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	-	-		170	610.000.000	175	1.220.000.000	175	1.220.000.000	210	1.830.000.000	730	4.880.000.000		
						Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga (Ton)				-	10.000	457.500.000	13.125	915.000.000	14.250	915.000.000	15.750	1.372.500.000	53.125	3.660.000.000		
						pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	-	-		120	457.500.000	125	915.000.000	125	915.000.000	140	1.372.500.000	510	3.660.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2017)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			216		Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar (Ton)					10.000	152.500.000	13.125	305.000.000	14.250	305.000.000	15.750	457.500.000	53.125	1.220.000.000			
					pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	-	-		50	152.500.000	50	305.000.000	50	305.000.000	70	457.500.000	220	1.220.000.000			
					Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan		4.271.183.000		3.201.333.000		11.501.000.000		13.690.000.000		15.229.000.000		17.867.800.000		61.199.426.912			
					Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	17.080	3.536.563.000	11.620	559.168.000	12.120	980.000.000	12.620	1.585.000.000	13.120	1.550.000.000	13.620	2.300.000.000	13.620	6.974.168.000			
					Penyusunan Masterplan Pengembangan Balai Benih Ikan	Jumlah Dokumen Penyusunan Masterplan Pengembangan Balai Benih Ikan (Dokumen)	-	-	1	375.000.000									1	375.000.000		
					Pengadaan Vaksinasi dan Cara Pemberian Vaksinasi Perikanan Budidaya	Jumlah Pembudidaya yang dibantu Vaksinasi Perikanan (Orang)	-	-	-	200	230.000.000	200	385.000.000	-		200	450.000.000	600	1.065.000.000			
					Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	-	-	3	184.168.000	7	400.000.000	10	550.000.000	13	700.000.000	16	850.000.000	49	2.684.168.000		
					Percontohan Budidaya Perikanan	Jumlah Luasan Areal Budidaya (Paket)	-	-	-	4	350.000.000	6	650.000.000	8	850.000.000	10	1.000.000.000	28	2.850.000.000			
					Angka Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	49	734.620.000	53	734.620.000	54	1.446.000.000	55	1.485.000.000	56	1.500.000.000	57	1.545.000.000	57	6.710.620.000			
					Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran	Jumlah promosi usaha perikanan (Kegiatan)	4 Kegiatan	437.932.000	4	437.932.000	5	731.000.000	5	735.000.000	5	740.000.000	5	745.000.000	24	3.388.932.000		
					Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah promosi usaha perikanan (Pameran)	2 Pameran	296.688.000	3	296.688.000	4	715.000.000	5	750.000.000	5	760.000.000	8	800.000.000	25	3.321.688.000		
					Volume Produksi Olahan (Ton)	24.000		20.610	1.857.605.000	21.110	175.000.000	21.610	180.000.000	22.110	185.000.000	22.610	190.000.000	22.610	2.297.898.912			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2017)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Identifikasi Potensi dan Penyusunan Panduan Investasi Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Kajian Identifikasi Potensi dan Penyusunan Panduan Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dokumen)	-	-	1	1.753.905.000								1	1.464.198.912			
					Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan	Jumlah pelaku usaha yang dibina untuk mendapatkan penerbitan SKP pada UPI skala menengah-besar maupun skala mikro-kecil (Pelaku Usaha)	-	-	30	103.700.000	30	175.000.000	30	180.000.000	30	185.000.000	30	190.000.000	150	833.700.000		
						Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran (%)			1,12	49.940.000	1,14	3.054.000.000	1,16	3.474.000.000	1,18	3.744.000.000	1,20	4.044.000.000	1,20	14.365.940.000		
					Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se-Bangka	Jumlah pasar hasil perikanan yang dibina (Pasar)	-	-	7	49.940.000	7	70.000.000	7	90.000.000	7	120.000.000	7	140.000.000	35	469.940.000		
					Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang diadakan bagi masyarakat berupa alat pengolahan (Pasar)	-	-			12	2.400.000.000	12	2.480.000.000	12	2.560.000.000	10	2.600.000.000	46	10.040.000.000		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Paket)	-	-	-	-	5	584.000.000	8	904.000.000	11	1.064.000.000	14	1.304.000.000	38	3.856.000.000		
						Persentase kontribusi komoditas ikan dalam menyumbang inflasi (%)			11,11	-	22,22	5.100.000.000	22,22	6.120.000.000	33,33	7.344.000.000	55,56	8.812.800.000	56	27.376.800.000		
					Pengadaan Coldstorage	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Unit)	-	-	-	-	2	5.100.000.000	2	6.120.000.000	2	7.344.000.000	3	8.812.800.000	9	27.376.800.000		
						Pertumbuhan Volume Produksi Olahan di kawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu Teluk Klabat (Ton)			-	120	300.000.000	160	310.000.000	220	320.000.000	300	325.000.000	300	1.255.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2017)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi							
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD						
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)					
					Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang diadakan bagi masyarakat berupa alat pengolahan (Pasar)			-		1	300.000.000		1	310.000.000		1	320.000.000		1	325.000.000		4	1.255.000.000		
						Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok (Ton)				-	220	73.000.000	270	113.000.000	330	133.000.000	420	163.000.000	420	482.000.000						
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Paket)		-			1	73.000.000		1	113.000.000		1	133.000.000		1	163.000.000		4	482.000.000		
						Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik (Ton)				-	121	73.000.000	163	113.000.000	225	133.000.000	307	163.000.000	307	482.000.000						
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Paket)		-			1	73.000.000		1	113.000.000		1	133.000.000		1	163.000.000		4	482.000.000		
						Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga (Ton)				-	121	300.000.000	163	310.000.000	225	320.000.000	307	325.000.000	307	1.255.000.000						
								Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang diadakan bagi masyarakat berupa alat pengolahan (Pasar)			-		1	300.000.000		1	310.000.000		1	320.000.000		1	325.000.000		4
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan			482.455.000		820.286.000		6.550.000.000		4.700.000.000		3.300.000.000		3.550.000.000					18.920.286.000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2017)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			<div></div> <div></div> <div></div>		Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	-	482.455.000	80	820.286.000	84	6.550.000.000	88	4.700.000.000	92	3.300.000.000	96	3.550.000.000	96	18.920.286.000		
			<div></div> <div></div> <div></div>	Peningkatan kapasitas pengujian mutu hasil produk kelautan dan perikanan	Jumlah sampel yang diuji untuk keamanan pangan produk kelautan dan perikanan dari bahan berbahaya (sampel)			600		650	5.500.000.000	700	3.500.000.000	750	2.000.000.000	800	2.000.000.000	3.500	13.000.000.000		
			<div></div> <div></div> <div></div>	Pembinaan, Supervisi dan Sosialisasi Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi standar sertifikasi mutu dan keamanan pangan hasil produk kelautan dan perikanan (UPI)			50		75	150.000.000	100	250.000.000	125	300.000.000	150	350.000.000	500	1.050.000.000		
			<div></div> <div></div> <div></div>	peningkatan fungsi laboratorium pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan	Jumlah Bulan layanan fungsi pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan (Bulan Layanan)	12	482.455.000	12	820.286.000	12	900.000.000	12	950.000.000	12	1.000.000.000	12	1.200.000.000	12	4.870.286.000		
			<div></div> <div></div> <div></div>	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau			764.640.000		1.140.402.400		2.735.000.000		3.040.000.000		3.170.000.000		3.200.000.000		13.285.402.400		
			<div></div> <div></div> <div></div>		Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)		320.840.000	8,75	276.672.000	9,63	885.000.000	10,59	1.140.000.000	11,65	1.245.000.000	12,81	1.250.000.000	53,42	4.796.672.000		
			<div></div> <div></div> <div></div>	Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP)	Jumlah produksi benih (Juta Ekor)	1 Paket	320.840.000	35,00	191.160.000	39,00	750.000.000	42,00	1.000.000.000	47,00	1.100.000.000	51,00	1.100.000.000	214,00	4.141.160.000		
			<div></div> <div></div> <div></div>	Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Payau	Tingkat survival rate benih (%)	-	-	25	85.512.000	30	135.000.000	33	140.000.000	35	145.000.000	38	150.000.000	38	655.512.000		
			<div></div> <div></div> <div></div>		Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	25	443.800.000	25,00	863.730.400	26,25	1.850.000.000	28,88	1.900.000.000	31,76	1.925.000.000	34,94	1.950.000.000	146,83	8.488.730.400		
			<div></div> <div></div> <div></div>	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak	Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Bulan Layanan)	12	443.800.000	12	863.730.400	12	1.850.000.000	12	1.900.000.000	12	1.925.000.000	12	1.950.000.000	12	8.488.730.400		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2017)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi					
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut			942.670.000		1.013.286.000		1.740.000.000		1.900.000.000		1.995.000.000		2.090.000.000		8.738.286.000					
							Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)		393.100.000	0,05	223.906.000	0,06	540.000.000	0,07	600.000.000	0,08	645.000.000	0,09	690.000.000			0,34	2.698.906.000	
							Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa	Jumlah produksi benih (Juta Ekor)	1 Paket	393.100.000	0,055	223.906.000	0,065	440.000.000	0,075	480.000.000	0,085	520.000.000	0,095			560.000.000	0,38	2.223.906.000
							Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Laut	Tingkat Survival Rate Benih (%)	-	-	-	30,00	100.000.000	33,00	120.000.000	35,00	125.000.000	38,00	130.000.000			38,00	475.000.000	
							Pertambahan Jumlah pendepatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	150	549.570.000	75,00	789.380.000	82,50	1.200.000.000	86,63	1.300.000.000	93,56	1.350.000.000	102,91	1.400.000.000			440,59	6.039.380.000	
							Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa	Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Bulan Layanan)	12	549.570.000	12	789.380.000	12	1.200.000.000	12	1.300.000.000	12	1.350.000.000	12			1.400.000.000	12	6.039.380.000
							Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar		-	560.600.000		437.137.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.150.000.000				1.200.000.000		4.887.137.000
							Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	-	560.600.000	0,30	437.137.000	0,33	1.000.000.000	0,36	1.100.000.000	0,40	1.150.000.000	0,44	1.200.000.000			1,83	4.887.137.000	
							Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)	Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Bulan Layanan)		560.600.000	12	437.137.000	12	1.000.000.000	12	1.100.000.000	12	1.150.000.000	12			1.200.000.000	12	4.887.137.000
				PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN RUANG LAUT			2.902.450.000		11.275.540.000		15.636.000.000		22.332.000.000		26.703.000.000		32.206.320.000		108.152.860.000					
								1,60	5.100.000.000	2,13	6.210.000.000	2,13	9.466.000.000	2,13	11.317.200.000	2,66	13.688.400.000	3	45.781.600.000					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2017)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
					Pembangunan Dermaga Jetty	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir (Jetty)	-	-	3	5.100.000.000	2	5.610.000.000	4	8.856.000.000	4	10.517.200.000	4	12.688.400.000	17	42.771.600.000			
									Desalinasi Air Laut	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir (Unit)	-	-	-	3	600.000.000	3	610.000.000	4	800.000.000	5			1.000.000.000
Meningkatkan Pembangunan Berbasis Industri di Bidang Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	Pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan per kapita (Juta Rupiah)			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN		-		-		300.000.000		310.000.000		320.000.000		325.000.000		1.255.000.000				
									Pertumbuhan Volume Produksi Olahan di kawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu Teluk Klabat (Ton)		-	120	300.000.000	160	310.000.000	220	320.000.000	300	325.000.000	300	1.255.000.000		
									Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang diadakan bagi masyarakat berupa alat pengolahan (Pasar)		-		1	300.000.000	1	310.000.000	1	320.000.000	1	325.000.000	4	1.255.000.000
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP		-		-		610.000.000		1.220.000.000		1.220.000.000		1.830.000.000		4.880.000.000
									Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di kawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu Teluk Klabat (Ton)		-	2.750	610.000.000	3.000	1.220.000.000	3.250	1.220.000.000	3.550	1.830.000.000	12.550	4.880.000.000		
									pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	-	-		170	610.000.000	175	1.220.000.000	175	1.220.000.000	210	1.830.000.000	730	4.880.000.000
Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan.	Wilayah berbasis kelautan dan perikanan yang dapat dibangun dan dikelola dengan baik	Persentase Wilayah berbasis kelautan dan Perikanan yang terbangun dan terkelola (%)			PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN RUANG LAUT		2.902.450.000		6.175.540.000		8.826.000.000		12.256.000.000		14.585.800.000		17.517.920.000		59.361.260.000				
									Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		1,60	5.100.000.000	2,13	6.210.000.000	2,13	9.466.000.000	2,13	11.317.200.000	2,66	13.688.400.000	3	45.781.600.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2017)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatkan Pengawasan terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya wilayah Kelautan dan Perikanan yang diawasi	Persentase Wilayah perairan Bangka Belitung yang diawasi (%)			Pembangunan Dermaga Jetty	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir (Jetty)	-	3	5.100.000.000	2	5.610.000.000	4	8.856.000.000	4	10.517.200.000	4	12.688.400.000	17	42.771.600.000			
					Desalinasi Air Laut	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir (Unit)	-	-	-	3	600.000.000	3	610.000.000	4	800.000.000	5	1.000.000.000	15	3.010.000.000			
						Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)	550.000	2.902.450.000	815.077	195.020.000	820.077	2.100.000.000	825.077	2.220.000.000	830.077	2.629.000.000	835.077	3.114.800.000	835.077	10.258.820.000		
					Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	Luas kawasan konservasi Perairan Daerah yang ditetapkan (Ha)	-	-	44.000	195.020.000	544.000	500.000.000	554.000	300.000.000	554.150	325.000.000	556.150	350.000.000	556.150	1.670.020.000		
					Review Profil Pulau Kecil	Jumlah pulau-pulau kecil yang terdata (Pulau)	-	-	-	120	1.600.000.000	120	1.920.000.000	100	2.304.000.000	130	2.764.800.000	470	8.588.800.000			
						Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi (%)			60	880.520.000	65	516.000.000	75	570.000.000	80	639.800.000	85	714.720.000	85	3.320.840.000		
					Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Rekomendasi Teknis Penerbitan Perizinan (Rekomendasi Izin)	-	-	7	197.120.000	7	240.000.000	7	288.000.000	14	345.600.000	21	414.720.000	56	1.485.440.000		
					Pendampingan Teknis RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah kegiatan pendampingan teknis RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (7 Kegiatan)	-	-	7	683.400.000									7	683.400.000		
					Identifikasi dan Survey Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan perizinan (Rekomendasi Izin)	-	-	-	7	276.000.000	14	282.000.000	21	294.000.000	28	300.000.000	70	1.152.000.000			
						Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			991.000.500		1.216.773.000		2.550.000.000		2.860.000.000		3.090.000.000		3.600.000.000		13.316.773.000	
				Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)			991.000.500	65	1.216.773.000	70	2.550.000.000	75	2.860.000.000	80	3.090.000.000	85	3.600.000.000	85	13.316.773.000			
				Pengawasan sumber daya kelautan	Jumlah hari operasi kapal pengawas (Hari Operasi)		844.120.500	150	825.210.000	160	1.450.000.000	170	1.680.000.000	180	1.820.000.000	180	2.240.000.000	840	8.015.210.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2017)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
					Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pelaku Usaha)			30		35		40		45		50		200					
						Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Pokmaswas aktif (Kelompok)			50	102.515.000	55	450.000.000	60	470.000.000	65	490.000.000	70	510.000.000	70	2.022.515.000		
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Taat terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pelaku Usaha)			60		65		70		75		80		80			
							Pengawasan tindak pidana kelautan dan perikanan	Jumlah perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai disidik secara akuntabel dan tepat waktu serta data dan informasi tindak pidana kelautan dan perikanan di kab/kota yang akuntabel (Berkas)	-	-	7	124.000.000	10	200.000.000	12	220.000.000	14	260.000.000	16	300.000.000	59	1.104.000.000	
				Peningkatan fungsi BOOST Center	Jumlah Bulan layanan fungsi BOOST Center (Bulan Layanan)	12	146.880.000	12	165.048.000	12	240.000.000	12	260.000.000	12	280.000.000	12	300.000.000	12	1.245.048.000				
				Peningkatan Kualitas SDM Pengawasan	Jumlah SDM Pengawasan yang dibina (Orang)	-	-	-		50	210.000.000	60	230.000.000	70	240.000.000	80	250.000.000	260	930.000.000				
Total Anggaran								26.454.953.300		75.964.218.460		83.413.479.383		93.655.942.710		103.577.919.845		382.776.807.610					

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Secara terperinci disajikan pada tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
		Tahun 2017	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah							
1	Nilai LAKIP	B	BB	BB	A	A	AA	AA
a	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (%)	100	100	100	100	100	100	100
b	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (%)	100	100	100	100	100	100	100
c	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya (%)	100	100	100	100	100	100	100
d	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (%)	100	100	100	100	100	100	100
e	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (Dokumen)	2	2	2	2	2	2	2
f	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (Dokumen)	4	4	4	4	4	4	4
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP							
2	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	181.000	211.300	215.300	219.300	223.300	227.300	227.300
a	Jumlah PPI yang ditingkatkan dan dikembangkan (PPI)	-	1	4	2	4	2	13

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
		Tahun 2017	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
b	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Kapal)	-	12	20	22	22	25	101
c	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	-	1.010	1.020	1.050	1.050	1.400	5.530
d	Jumlah Nelayan yang dipantau dan dievaluasi kesesuaian sarana dengan Aktivitas perikanan Tangkap (Orang)	-	-	85	90	95	100	370
e	Jumlah Rekomendasi Teknis Penerbitan Perizinan (Rekomendasi)	-	-	300	300	300	300	1.200
f	Terselenggaranya Pelaksanaan Temu Nelayan Nusantara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kegiatan)	-	-					-
g	Jumlah bulan layanan fungsi syahbandar pelabuhan perikanan (Bulan)	12	-	12	12	12	12	12
3	Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	107	108	109	110	111	112	112
a	Jumlah Nelayan yang dibantu sarana dan prasarannya (Orang)	10.000 Data Kartu Nelayan, 10.000 Data Asuransi Nelayan, 700 SeHat Nelayan	-	700	700	700	700	2.800
4	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap (%)	-	6,79	6,82	6,84	6,86	6,87	6,87
a	Jumlah SDM Perikanan Tangkap yang dibina (Orang)	-	50	70	70	70	70	330
b	Jumlah Nelayan yang dibina (Orang)	-	25	70	70	70	70	305
5	Pertambahan pendapatan asli daerah dari layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Juta Rupiah)	-	368	386	406	463	468,00	2.091
a	jumlah layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Bulan Layanan)	-	12	12	12	12	12	60
6	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu Teluk Klabat (Ton)			2.750	3.000	3.250	3.550	12.550
a	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	-		170	175	175	210	730
7	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok (Ton)			19.500	22.500	26.500	31.000	99.500
a	Jumlah sarana dan							

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
		Tahun 2017	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	-		170	175	175	210	730
8	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik (Ton)			33.000	35.000	37.000	39.000	144.000
a	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	-		170	175	175	210	730
9	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga (Ton)			10.000	13.125	14.250	15.750	53.125
b	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	-		120	125	125	140	510
10	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar (Ton)			10.000	13.125	14.250	15.750	53.125
a	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	-		50	50	50	70	220
III	Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan							
11	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	17.080	11.620	12.120	12.620	13.120	13.620	13.620
a	Jumlah Dokumen Penyusunan Masterplan Pengembangan Balai Benih Ikan (Dokumen)	-	1					1
b	Jumlah Pembudidaya yang dibantu Vaksinasi Perikanan (Orang)	-	-	200	200	-	200	600
c	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	-	3	7	10	13	16	49
d	Jumlah Luasan Areal Budidaya (Paket)	-	-	4	6	8	10	28
12	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	49	53	54	55	56	57	57
a	Jumlah promosi usaha perikanan (Kegiatan)	4 Kegiatan	4	5	5	5	5	24
b	Jumlah promosi usaha perikanan (Pameran)	2 Pameran	3	4	5	5	8	25
13	Volume Produksi Olahan (Ton)	24.000	20.610	21.110	21.610	22.110	22.610	22.610
a	Jumlah Dokumen Kajian Identifikasi Potensi dan Penyusunan Panduan Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dokumen)	-	1					1
b	Jumlah pelaku usaha yang dibina untuk mendapatkan penerbitan	-	30	30	30	30	30	150

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
		Tahun 2017	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SKP pada UPI skala menengah-besar maupun skala mikro-kecil (Pelaku Usaha)							
14	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran (%)		1,12	1,14	1,16	1,18	1,20	1,20
a	Jumlah pasar hasil perikanan yang dibina (Pasar)	-	7	7	7	7	7	35
b	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang diadakan bagi masyarakat berupa alat pengolahan (Pasar)		-	12	12	12	10	46
c	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Paket)	-	-	5	8	11	14	38
15	Persentase kontribusi komoditas ikan dalam menyumbang inflasi (%)		11,11	22,22	22,22	33,33	55,56	56
a	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Unit)	-	-	2	2	2	3	9
16	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu Teluk Klabat (Ton)			120	160	220	300	300
a	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang diadakan bagi masyarakat berupa alat pengolahan (Pasar)		-	1	1	1	1	4
17	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok (Ton)			220	270	330	420	420
a	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Paket)	-	-	1	1	1	1	4
18	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik (Ton)			121	163	225	307	307
a	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Paket)	-	-	1	1	1	1	4
19	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga (Ton)			121	163	225	307	307
a	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang diadakan bagi masyarakat berupa		-	1	1	1	1	4

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
		Tahun 2017	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	alat pengolahan (Pasar)							
IV	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan							
20	Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	-	80	84	88	92	96	96
a	Jumlah sampel yang diuji untuk keamanan pangan produk kelautan dan perikanan dari bahan berbahaya (sampel)		600	650	700	750	800	3.500
b	Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi standar sertifikasi mutu dan keamanan pangan hasil produk kelautan dan perikanan (UPI)		50	75	100	125	150	500
c	jumlah Bulan layanan fungsi pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan (Bulan Layanan)	12	12	12	12	12	12	12
V	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau							
21	Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)		8,75	9,63	10,59	11,65	12,81	53,42
a	Jumlah produksi benih (Juta Ekor)	1 Paket	35,00	39,00	42,00	47,00	51,00	214,00
b	Tingkat survival rate benih (%)	-	25	30	33	35	38	38
22	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	25	25,00	26,25	28,88	31,76	34,94	146,83
a	Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Bulan Layanan)	12	12	12	12	12	12	12
VI	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut							
23	Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)		0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,34
a	Jumlah produksi benih (Juta Ekor)	1 Paket	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,38
b	Tingkat Survival Rate Benih (%)	-	-	30,00	33,00	35,00	38,00	38,00
24	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	150	75,00	82,50	86,63	93,56	102,91	440,59
a	Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Bulan Layanan)	12	12	12	12	12	12	12

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
		Tahun 2017	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VII	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar	-						
25	Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	-	0,30	0,33	0,36	0,40	0,44	1,83
a	Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Bulan Layanan)		12	12	12	12	12	12
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN RUANG LAUT							
26	Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		1,60	2,13	2,13	2,13	2,66	2,66
a	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir (Jetty)	-	3	2	4	4	4	17
b	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir (Unit)	-	-	3	3	4	5	15
27	Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)	550.000	815.077	820.077	825.077	830.077	835.077	835.077
a	Luas kawasan konservasi Perairan Daerah yang ditetapkan (Ha)	-	44.000	544.000	554.000	554.150	556.150	556.150
b	Jumlah pulau-pulau kecil yang terdata (Pulau)		-	120	120	100	130	470
28	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi (%)		60	65	75	80	85	85
a	Jumlah Rekomendasi Teknis Penerbitan Perizinan (Rekomendasi Izin)	-	7	7	7	14	21	56
b	Jumlah kegiatan pendampingan teknis RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (7 Kegiatan)	-	7					7
c	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan perizinan (Rekomendasi Izin)	-	-	7	14	21	28	70
IX	Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan							
29	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)		65	70	75	80	85	85
a	Jumlah hari operasi kapal pengawas (Hari Operasi)		150	160	170	180	180	840
b	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pelaku Usaha)		30	35	40	45	50	200
c	Jumlah Pokmaswas aktif (Kelompok)		50	55	60	65	70	70

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
		Tahun 2017	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
d	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Taat terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pelaku Usaha)		60	65	70	75	80	80
e	Jumlah perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai disidik secara akuntabel dan tepat waktu serta data dan informasi tindak pidana kelautan dan perikanan di kab/kota yang akuntabel (Berkas)	-	7	10	12	14	16	59
f	Jumlah Bulan layanan fungsi BOOST Center (Bulan Layanan)	12	12	12	12	12	12	12
g	Jumlah SDM Pengawasan yang dibina (Orang)	-	-	50	60	70	80	260

BAB VIII

PENUTUP

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 -2022 mengakomodir program-program kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana Strategis 2017 – 2022 diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan. Disamping itu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan akan digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah dan terukur. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam lima tahun kedepan, Dinas Kelautan dan Perikanan akan menjalankan 9 Program dengan 29 Indikator Kinerja Program (outcome) dengan total pagu anggaran Rp.382.776.807.610.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan akan dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala pada tiap tahunnya melalui akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perencanaan 2017-2022, maka akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



HARDI, S.H, M.H
Pembina Utama Madya
NIP.19611013 198101 1 001

LAMPIRAN



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR **86** TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017-2022

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa “Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

10. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
11. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
20. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Perangkat Daerah dan kewenangan, program dan kegiatan pembangunan disertai kerangka pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman perencanaan untuk masa 5 (lima) tahun.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, dan prakiraan maju yang disertai indikator kinerja pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (6) Sistematisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

- c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
- e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
- g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- h. Bab VIII Penutup.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. pengendalian dan evaluasi kebijakan Penyusunan Renstra;
- b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra; dan
- c. evaluasi terhadap hasil Renstra.

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi kebijakan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir;
- b. Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan awal Renstra Perangkat Daerah untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD;
- c. Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda;
- b. Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pasal 6

Evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah setiap Bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

Pasal 7

- (1) Gubernur melalui Kepala Bappeda melakukan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah yang dinilai paling baik dalam pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mendapat nilai terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menerima penghargaan dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila diperlukan dan/atau terjadi perubahan RPJMD dan/atau disebabkan hal lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tidak sesuai dengan proyeksi target sasaran, program dan kegiatan serta ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (3) Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan dan perubahan kebijakan.

Pasal 9

- (1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 terdiri dari:
 - I. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - II. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - III. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - IV. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - V. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - VI. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - VII. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - VIII. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - IX. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - X. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - XI. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - XII. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - XIII. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - XIV. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - XV. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- XVI. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XVII. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XVIII. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XIX. Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XX. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXI. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXII. Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXIII. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXIV. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXV. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXVI. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXVII. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXVIII. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXIX. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXX. Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXXI. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXXII. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXXIII. RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXXIV. Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Desember 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
NOMOR.....SERI.....



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

**Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Kel. Air Itam, Pangkalpinang, 33148,
Telp. (0717) 439302**